



SAMBUTAN

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DALAM KEGIATAN
KONSULTASI, INFORMASI DAN EDUKASI
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAGI BUMD DAN PERUSAHAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025**

Kamis, 23 Oktober 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati:

Ibu Damaris Butar Butar, Arsiparis Ahli Utama ANRI,

Bapak Achmad Fauzan, Arsiparis Ahli Madya Kementerian
Sekretariat Negara,

Para pimpinan unit kearsipan, pengelola arsip dari BUMD
dan perusahaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta,

Hadirin yang saya muliakan.

Hadirin yang saya hormati,

Sering kali kita berpikir bahwa arsip hanyalah dokumen
masa lalu. Namun sesungguhnya, arsip adalah pusat
gravitasi peradaban birokrasi dan korporasi. Ia tidak hanya
menyimpan ingatan, tetapi juga menata kekuasaan,

membentuk narasi, bahkan menentukan legitimasi masa depan.

Sebagaimana dikatakan Michel Foucault, pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks kearsipan, siapa yang menguasai arsip, ia mengendalikan memori dan arah kebijakan. Di sinilah letak signifikansi kearsipan bukan sekadar fungsi administratif, melainkan fungsi epistemik dan politis.

Kearsipan adalah refleksi dari cara kita berpikir, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan publik. Ia bukan arsip untuk arsip, melainkan arsip untuk tata kelola yang beradab (archival governance with civility).

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2018. Namun, yang menjadi pertanyaan kritis bukan sekadar: “Apakah kita

sudah memiliki regulasi?”, melainkan: “Apakah regulasi itu sudah hidup dalam praktik organisasi?”

Dalam banyak kasus, arsip masih dianggap beban administratif, bukan modal intelektual organisasi (organizational intellectual capital).

Padahal, jika kita menengok ke pemikiran Peter Drucker dan Manuel Castells, dunia memasuki era ekonomi pengetahuan di mana sumber daya paling berharga bukan lagi modal finansial, melainkan information capital dan knowledge management.

Arsip adalah fondasi dari dua hal itu.

Oleh karena itu, BUMD dan perusahaan daerah di Jakarta seharusnya tidak sekadar mematuhi aturan kearsipan, tetapi menempatkan arsip sebagai sumber daya strategis untuk pengambilan keputusan, mitigasi risiko, dan penciptaan nilai publik.

Hadirin yang saya muliakan,

Jika kita meninjau dari perspektif filsafat ilmu administrasi, arsip mencerminkan modus rasionalitas birokrasi yang dirumuskan oleh Max Weber yakni sistem dokumentasi yang menjadi jantung dari rasionalitas legal.

Namun dalam konteks kontemporer, kita menghadapi dilema baru: arsip fisik menghadapi erosi eksistensial oleh gelombang digitalisasi.

Maka, tantangan kita bukan hanya digitizing archives, tetapi reconceptualizing archiving itself.

Kita perlu mendefinisikan ulang makna arsip dalam konteks digital epistemology — bagaimana data, metadata, dan jejak digital menjadi bukti, memori, sekaligus instrumen akuntabilitas.

Transformasi digital kearsipan bukan soal aplikasi atau server, tetapi revolusi paradigma pengetahuan. Kita harus berani bertanya: apakah sistem kearsipan digital kita sekadar menyimpan data, ataukah ia mampu menumbuhkan kecerdasan institusional (institutional intelligence)?

Hadirin yang berbahagia,

Kearsipan yang baik adalah cermin dari peradaban organisasi yang matang.

BUMD dan perusahaan daerah di Jakarta harus menyadari bahwa arsip bukan hanya milik masa lalu, tetapi investasi untuk masa depan. Di balik setiap dokumen kontrak, laporan, dan surat keputusan, tersimpan jejak sejarah yang kelak menjadi sumber legitimasi, pembelajaran, dan bahkan inovasi.

Kita dapat belajar dari praktik di negara-negara maju: National Archives di Inggris, misalnya, telah mengembangkan konsep Archives as Evidence and as Infrastructure for Democracy — arsip tidak hanya merekam, tetapi memperkuat public trust.

Demikian pula di Korea Selatan, sistem e-Government mereka berhasil menciptakan sinergi antara data dan arsip untuk decision-making real-time.

Jakarta sebagai kota global tidak boleh tertinggal. Kita harus membangun ekosistem kearsipan digital yang terintegrasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat. Sebab arsip adalah jembatan antara memori kota dan masa depan kotanya.

Hadirin yang saya hormati,

Maka, tugas kita hari ini bukan sekadar belajar cara menyimpan arsip dengan benar, tetapi menata kembali cara berpikir tentang arsip.

Kearsipan harus kita pandang sebagai the art of remembering responsibly — seni mengingat secara bertanggung jawab.

Sebab bangsa yang gagal mengelola ingatannya, lambat laun akan kehilangan arah masa depannya.

Kegiatan hari ini saya harapkan menjadi ruang intelektual untuk memperluas cara pandang, memperdalam kapasitas teknis, dan meneguhkan komitmen moral bahwa setiap arsip yang kita kelola adalah bagian dari sejarah besar Jakarta dan Indonesia.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

acara Konsultasi, Informasi, dan Edukasi Penyelenggaraan Kearsipan bagi BUMD dan Perusahaan Tahun 2025 saya nyatakan resmi dibuka.

Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi awal dari kebangkitan paradigma baru kearsipan di Jakarta.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.